

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, di mana demokrasi ini adalah suatu istilah yang bersifat universal. Namun tidak ada satu sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa atau semua negara. Istilah boleh sama, tetapi isi dan cara perwujudannya bersifat berbeda-beda dari negara yang satu ke negara yang lain.¹

Democracy is a set of designed to promote self-government. Democracy comes from the greek words demos, which means "the people." and kratis, meaning "to rule." In simple terms, democracy is a form of government in, which the people govern, either directly or through elected representatives². (Demokrasi adalah seperangkat dirancang untuk mempromosikan pemerintahan sendiri. Demokrasi berasal dari Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratis* pemerintahan yang berarti memerintah, dalam istilah sederhana demokrasi yaitu dimana rakyat memerintah baik secara langsung atau melalui perwakilan).

Istilah demokrasi itu mengandung pengertian-pengertian yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap

¹ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 201.

² Thomas E. Patterson, *The An Democracy*, New York: Mc Graw-Hill, 2003. h . 21

warga negara, yang dikenal dengan sebutan demokrasi langsung. Demokrasi juga di jelaskan sebagai bentuk pemerintahan di mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga dewan perwakilan rakyat, dimana wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat.³

Adapun pengertian lain dari demokrasi adalah: (1) *country with principles of government in which all adult citizen share through their ellected representatives*; (2) *country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities*, (3) *society in which there is treatment of each other by citizens as equals*⁴. ((1) Negara dengan prinsip-prinsip pemerintahan di mana semua warga negara dewasa berbagi melalui perwakilan mereka yang dipilih. (2) Negara yang pemerintahannya mendorong dan memungkinkan hak kewarganegaraan seperti kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, dan berserikat, penegakan aturan hukum, aturan mayoritas, disertai dengan penghormatan terhadap hak-hak minoritas (3) Masyarakat dimana ada perlakuan satu sama lain oleh warga negara sebagai sederajat).

³ Rafael Raga Maran, Op.cit.,. 201.

⁴ Heri Herdiawanti dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 80

Dari uraian di atas sudah jelas dikatakan bahwa demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih, pemerintahannya harus mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan *rule of law*, Adanya pemerintahan yang lebih menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang.

Salah satu bentuk politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi adalah Pemilihan Umum atau yang biasa di singkat (Pemilu). Pemilu dianggap sebagai bentuk paling *riil* dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pemilu dan partai politik merupakan satu kesatuan dalam sistem politik demokratis. Pemilu adalah arena pertarungan partai politik. Sedangkan partai politik melakukan pemilu dalam rangka memperoleh kekuasaan. Pada penjelasan ini menunjukkan keterikatan antara pemilu dan parpol. Dalam sistem politik demokrasi, pemilu diharuskan dilaksanakan dengan mengedepankan kebebasan, jaminan kerahasiaan, dan kompetisi. Namun pada saat yang sama partai politik juga diharapkan bisa menjadi faktor kunci dalam mendorong terbangunnya sistem politik yang demokratis. karena pemilu menjadi tolak ukur bagi perkembangan demokrasi suatu bangsa.⁵

⁵ Haboddin, Muhtar, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Malang: Airlangga, 2016), h. 1

Pada politik moderen partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak di pelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan. Secara umum partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)⁶

Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat diperlukan, partisipasi dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, perhitungan cepat hasil pemilu. Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih para calon wakil rakyat, atau untuk memilih kepala negara.⁷

Masalah politik dan kepemimpinan publik ini sudah menjadi sorotan tersendiri dalam ajaran Islam. Orang yang menjadi pemimpin menduduki posisi yang penting dalam pandangan Islam, sebab ia harus ditaati bersamaan

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

⁷Rafael Raga Maran, *Op.cit*, h. 148

dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini diterangkan dalam QS.An-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(QS.An-Nisa/4:59).⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt mewajibkan kita untuk mentaati *ulil amri* di antara kita dan *ulil amri* yang dimaksud adalah para *imam* (khalifah) yang memerintahkan dimana di jelaskan lagi dengan adanya Sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»⁹

“Telah menceritakan kepada kami Abdan, dari Abdullah, dari Yunus, dari Zuhry Telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, Sesungguhnya telah mendengar dari Abu Hurairah R.a, Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang taat kepadaku maka dia benar-benar taat kepada Allah , dan barang siapa durhaka kepada ku maka dia benar-benar durhaka kepada Allah, dan barang siapa taat kepada ulil amri maka dia benar-benar taat kepada ku, dan

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 125

⁹ Shalih Bin Abdul Aziz, Bin Muhammad Bin Ibrahim, *Al Kitabul Assitah Shahih Bukhari* ((Arriyad: Makhtabab Darussalam, 2008); Maktabah Rihlan), h. 595.

barang siapa durhaka kepada ulil amri maka dia benar-benar durhaka kepadaku” (HR. Bukhari)¹⁰

Mereka yang punya hak pilih tapi secara sadar memilih untuk tak menggunakannya atau bisa disebut golongan putih alias golput selalu ada dalam setiap pemilu. Pada pemilu 1999, tingkat partisipasi pemilih mencapai 90% lebih, setelahnya, golput selalu melebihi angka 15% dari jumlah pemilih pada pemilu legislatif (pileg) 2004, jumlah golput mencapai 15,9 persen. Pada pilpres tahun yang sama, jumlah pemilih yang tak menggunakan suaranya berjumlah 28,3 persen. Keberadaan golput berlanjut dipileg 2014, dengan 24,89 persen pemilih masuk kategori ini. Pada saat pilpres 2014, angka golput mencapai titik tertinggi yakni 30% lebih dari jumlah pemilih.¹¹

Perspektif politik dalam keterwakilannya di lembaga formal Negara, partai memiliki peran dan posisi yang strategis karena partai politik merupakan bagian penting dari pilar-pilar demokrasi. Demokrasi prosedural maupun substansial akan senantiasa menempatkan aktor politik utamanya yakni partai politik sebagai instrumen jalannya pemilu¹²

Menurut Pasal 11 C Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

¹⁰ Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawy, Riyadus Shalihin I, terjemahan oleh Muslich Syabir *Terjemahan Riyadus Shalihin I*, (Semarang: CV Toha Putera, 1981), h. 539.

¹¹ <https://tirto.id/membedah-potensi-gelombang-golput-di-pilpres-2019-cRYi>. diakses pada hari kamis, 01-2019, jam 19:01.17

¹² Hidayat Sardani, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta:Fajar Media Press, 2011), h. 22.

Partai Politik yaitu: Penyerapan, Penghimpun, dan Penyalur aspirasi masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Adapun salah satu fungsi partai politik yaitu partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana politiknya kepada masyarakat. Wacana dari sebuah partai politik dapat dilihat dari visi, misi, dan program partai-partai tersebut. Berharap agar masyarakat semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Selain itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui sosialisasi masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹³

Pada perkembangan masyarakat yang majemuk memang menentukan peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesai dalam menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu partai sebagai bagian dari pergerakan demokrasi seharusnya dapat memberikan andil yang sangat besar bagi kemajuan bangsa. Dan pentingnya upaya partai dalam meningkatkan kesadaran politik di masyarakat.¹⁴

¹³Muhammada Jafa.AW, "Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam", Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Ilmu Pilitik, Pascasarjana Universitas di Ponegoro: 2009, h. 26

¹⁴Debora Sanur Lindawati, *Strategi Partai Politik dalam menghadapi pemilu 2014*, Vol 4, Nomor. 2 November 2013. h. 32

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti sangat tertarik dengan permasalahan ini, karena ini merupakan hal yang baru dan masih selalu menjadi perbincangan dan problematika hangat sampai sekarang, sehingga penulis berniat meneliti mengenai **“Upaya Partai Politik Dalam Meningkatkan Motivasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya partai politik dalam meningkatkan motivasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Faktor kendala partai politik dalam upaya meningkatkan motivasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan maka ditetapkanlah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya partai politik dalam meningkatkan motivasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor yang menjadi kendala partai politik dalam meningkatkan motivasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Sebagai kajian ilmiah dalam ketatanegaraan di bidang politik dan demokrasi
2. Sebagai bahan literatur bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan secara mendalam untuk mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan bacaan dan untuk menambah wawasan para generasi muda khususnya mahasiswa hukum tatanegara.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya Khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah yang menyangkut tentang ketatanegaraan.

E. Definisi Oprasional

Untuk Agar memudahkan pemahaman dari judul ini serta tidak adanya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka adapun definisi operasional dari judul ini yaitu:

1. Upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar¹⁵. Upaya yang dimaksud peneliti disini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh partai politik untuk meningkatkan motivasi pemilih pada pemilu tahun 2019
2. Partai Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 995

Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹⁶

Adapun partai politik yang dimaksud Penulis di sini adalah di ambil dari beberapa sampel partai politik yang ada di Kota Banjarmasin dan partai tersebut terdaftar pada pemilu tahun 2019 yaitu: PKB, PPP, PAN, DEMOKRAT dan NASDEM.

3. Meningkatkan yaitu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja dengan arti antara lain:

- a. Menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya); mempertinggi; memperhebat (produksi dan sebagainya);
- b. Mengangkat diri; memegahkan diri

Menurut Moeliono seperti yang dikutip Sawiwati, peningkatan adalah sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.¹⁷

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa makna dari kata meningkatkan adalah yaitu adanya suatu usaha dari partai politik meningkatkan atau memberikan motivasi kepada pemilih agar mau berpartisipasi pada pemilu tahun 2019 baik untuk memilih partai yang lain maupun untuk memilih partainya sendiri.

¹⁶ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 403-404.

¹⁷http://wahyono-saputra.blogspot.com/2011/06/skripsiupaya-guru_meningkatkan_21.html, diakses pada hari Rabu, 16-01-2019, Pukul 16:21 WITA

4. Motivasi, yaitu suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.¹⁸
Motivasi yang dimaksud peneliti disini adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh partai untuk mendorong pemilih agar mau berpartisipasi dan memberikan suaranya pada pemilu serentak tahun 2019
5. Pemilih Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilih diartikan sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
6. Pemilu Serentak yaitu: mempunyai arti sebagai penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) dimana penggabungan pelaksanaan kedua pemilu tersebut sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.¹⁹

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini

¹⁸.Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011, h .1

¹⁹ <http://www.tubasmedia.com/pemilu-serentak/#.XQ71kkFtbIV>, dikses, pada hari Minggu, 23-06-2019, Pukul 11:51 WITA.

dengan penelitian yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ada beberapa judul yaitu:

1. Penelitian oleh Hasna Kamalia, Nim: 1101130073, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden serentak tahun 2019 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)” walaupun sama membahas masalah pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden serentak tahun 2019. Ada perbedaan dari skripsi ini yakni didalam skripsi ini menganalisis implikasi dari putusan 14/PPU-XI/2013 tentang penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019, sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas tentang upaya yang dilakukan partai politik dalam meningkatkan motivasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin.²⁰
2. Tia Subekti, 2014, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. “partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum (*Study Turn of Voter* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)”. Dimana dalam penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum khususnya melihat *turn of voter* dalam pemilihan umum kepala daerah khususnya Kabupaten Magetan tahun

²⁰ Hasna Kamalia, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden serentak tahun 2019 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013),skripsi,fakultas syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.

2013, dalam penelitian ini sama-sama menyinggung masalah partisipasi masyarakat terhadap pemilu tetapi perbedaanya dimana peneliti lebih memfokuskan pada upaya partai dalam meningkatkan motivasi pemilih pada pemilu tahun 2019.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dengan tiap bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan di rumuskan dalam bentuk rumusan masalah kemudian setelah rumusan masalah itu ada, tentu ada tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan definisi operasional yang mana ini bertujuan untuk memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya signifikansi penelitian ini merupakan menyatakan kegunaan hasil penelitian itu apabila sudah selesai. Tinjauan pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lainnya yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti

²¹ Tia Subekti, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Study Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Magetan Tahun 2013*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Brawijaya, 2014.

BAB II, yaitu landasan teori, yang menerangkan, menguraikan serta menginformasikan masalah-masalah umum yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III, yaitu metode penelitian, yang merupakan suatu cara penggalan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang dibahas, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat, dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan serta analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV, laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat identitas responden.

BAB V yaitu penutup, yang mana dalam bab ini Penulis akan memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. dan selanjutnya akan dikemukakan saran yang dirasa perlu dan penting dari penelitian ini.

